

Apakah *Good Government Governance* dan Pengendalian Intern dapat Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik?

Cecilia Lelly Kewo¹, Linda A.O Tanor²

¹Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado, Manado
E-mail : clkewo@gmail.com

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado, Manado
E-mail : LindaTanor28@gmail.com

ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan menjadi isu yang sangat penting dewasa ini. Tata kelola pemerintahan merupakan suatu unsur dalam menjalankan roda pemerintahan. Semakin baik suatu pemerintahan dikelola oleh para pengambil kebijakan maka kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakatpun akan semakin baik dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat ke titik yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola pemerintahan atau *good government governance* (GGG) dan pengendalian intern terhadap kualitas akuntabilitas laporan keuangan sector public. Populasi dan sampel penelitian adalah aparatur sipil negara yang bekerja pada SKPD di Sulawesi Utara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan margin of error 5 % dan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh GGG terhadap akuntabilitas laporan keuangan sector public, demikian juga pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan sector publik

Kata Kunci

Good government governance, Pengendalian intern, Akuntabilitas laporan keuangan

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1998, model pemerintahan Republik Indonesia berubah dari formal kearah ke tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Perubahan model pemerintahan ini mengharuskan aparat pelaksana pemerintahan lebih siap akan perubahan lingkungan pemerintahan supaya pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik, lebih terbuka dan lebih akuntabel (Indra Bastian, 2006). Saat ini penilaian penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Indonesia, masih banyak kekurangan sehingga masih dibutuhkan komitmen yang lebih, agar implementasi *good corporate governance* dapat dirasakan secara merata serta memberikan dampak yang lebih baik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan ranking *E-Government Development Index* (EGDI) berdasarkan data tahun 2018. Pada 2016 Indonesia berada di urutan ke-107 EGDI, dimana pada tahun 2016 masih berada pada urutan ke-116. Indonesia berada pada urutan ke -7 di ASEAN setelah negara Vietnam. Indonesia berada pada urutan ke -7 di ASEAN setelah negara Vietnam. Urutan negara Indonesia masih jauh dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina serta Vietnam. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. *E-Government Development Index*

No.	Negara	EGDI Average
1	Spore	0.9150
2	Malaysia	0.7892
3	Thailand	0.7565
4	Brunai Darusalam	0.7386
5	Pilipina	0.6892
6	Vietnam	0.6667
7	Indonesia	0.6612
8	Asia south estern Asia	0.6321
9	Cambodia	0.5113
10	Timor Leste	0.4649
11	Mianmar	0.4316
12	Laos	0.3288

Dalam mencapai *good corporate governance*, pemerintah negara Indonesia telah membuat perubahan dalam manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun di daerah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang perbendaharaan negara menandai perubahan dalam sektor keuangan negara, yang diikuti dengan Undang-undang nomor 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam *public sector*, pemerintah daerah baik kabupaten dan kota merupakan entitas yang berkewajiban membuat akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan APBD. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kementerian dan lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah supaya tidak cepat puas dengan perolehan opini laporan keuangan

wajar tanpa Pengecualian (WTP) karena walaupun memperoleh opini WTP, namun terdapat pimpinan daerah yang tersangkut kasus korupsi. Sri Mulyani menyoroti lembaga negara dan pemerintah daerah yang sesudah memperoleh opini WTP sudah merasa puas, padahal opini WTP bukanlah tujuan terakhir dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan *feed back* untuk perencanaan yang lebih berkualitas. Pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk membuat keuangan negara yang lebih baik," tutur Sri Mulyani. Apabila semua lembaga negara mengelola anggaran secara efektif, maka pelaksanaan APBN akan semakin baik. Masih banyak yang perlu dibenahi terutama dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. (<https://ekonomi.kompas.com>).

Berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah, permasalahan utama antara lain masih terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan pendapatan dan belanja, *standar operating procedure* (SOP) tidak dijalankan secara optimal, SOP belum disusun atau tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan. Permasalahan lain dalam pengendalian intern terhadap pengelolaan pendapatan daerah yaitu kebijakan yang berdampak pada hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/tidak lengkap, mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI. Pada pengelolaan aset daerah yaitu pencatatan belum dilakukan atau tidak tepat, pelaksanaan kebijakan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan, lemah dalam pengelolaan fisik aset, dan lain-lain (IHPS II Tahun 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *good corporate governance* dan pengendalian intern terhadap kualitas akuntabilitas laporan keuangan baik secara partial maupun secara simultan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Good Government Governance

Tata kelola pada *public sector* mencakup seluruh kebijakan serta prosedur yang dipakai guna mengarahkan kegiatan organisasi guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan utama organisasi telah tercapai serta kegiatan operasional sudah dilaksanakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab (IIA, 2012). Australian National Audit Office and Department of the Prime Minister and Cabinet (2006) mengatakan bahwa Tata kelola dalam *public sector* meliputi seluruh rangkaian tanggung jawab dan pelaksanaan, kebijakan, dan prosedur, yang dilaksanakan oleh pengambil keputusan dalam satu instansi guna memberikan pedoman guna pencapaian tujuan dan mengelola tingkat risiko serta memprgunakan semua sumber daya dengan penuh tanggung jawab. IFAC (2001)

menyatakan bahwa *governance* berkaitan dengan proses, struktur, pertanggungjawaban, dan pengawasan serta perilaku pimpinan organisasi. Kemudian *good government* meliputi pengaturan yang diberlakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan bagi para *stakeholder* dapat terlaksana (IFAC&CFPA, 2014).

Dari beberapa pengertian di atas, *good government governance* atau tata kelola pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu struktur, kebijakan, prosedur, proses pengambilan keputusan dan perilaku pada pemerintahan guna memberikan arah yang memberi keyakinan pencapaian tujuan bagi para pemangku kepentingan.

Menurut Sedarmayanti (2012) terdapat 4 (empat) unsur atau prinsip utama pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas: Yaitu kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan untuk bertindak sebagai penanggungjawab atas tindakan dan kebijakan yang ditetapkan
2. Transparansi: Tata kelola pemerintahan yang baik bersifat transparan baik di tingkat pusat maupun daerah
3. Keterbukaan: Memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah.
4. Aturan Hukum : Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan public yang diambil.

Menurut The International Federation of Accountant/ IFAC (2001) prinsip-prinsip *good government public sector* terdiri dari:

1. *Openness*
Keterbukaan diperlukan untuk memastikan stakeholder yang dapat memiliki keyakinan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan entitas sektor publik, dalam pengelolaan kegiatan mereka, dan individu di dalamnya. Bersikap terbuka melalui konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan dan komunikasi informasi lengkap, akurat dan jelas mengarah ke tindakan yang efektif dan tepat waktu dan berdiri untuk pengawasan yang diperlukan
2. *Integrity*
Integritas terdiri dari transaksi langsung dan kelengkapan. Hal ini didasarkan pada kejujuran dan objektivitas, dan standar yang tinggi kesopanan dan kejujuran dalam pengelolaan dana publik dan sumber daya, dan pengelolaan urusan entitas
3. *Accountability*
Akuntabilitas adalah proses dimana entitas sektor publik, dan individu di dalamnya, bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan mereka, termasuk pelayanan dana publik dan

semua aspek kinerja, dan menyerahkan diri kepada yang sesuai pengawasan eksternal.

Selanjutnya menurut IFAC & CIFPA (2014) prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) terdiri dari:

1. *Behaving with integrity, demonstrating strong commitment to ethical values, and respecting the rule of law*
Berperilaku dengan integritas, menunjukkan komitmen yang kuat untuk nilai-nilai etika, dan menghormati aturan hukum
2. *Ensuring openness and comprehensive stakeholder engagement*
Memastikan keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan yang luas

2.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) tahun 2013 memberikan definisi pengendalian internal sebagai berikut: “*An Internal control is process, affected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in (1) Effectiveness and efficiency of operation, (2) Reliability of financial reporting, and (3) Compliance with applicable laws and regulations*”, mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai *a system of internal control consists of policies and procedures designed to provide management with reasonable assurance that company achieves its objectives and goals. The policies and procedures are often called controls, and collectively they comprise the entity’s internal control*”. Definisi ini mengartikan sistem pengendalian internal mengandung kebijakan dan langkah-langkah yang dibuat untuk memberi jaminan yang wajar untuk para manajemen untuk tercapainya tujuan perusahaan.

Selanjutnya *public sector* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai kegiatan atau Proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berlanjut oleh pimpinan dan seluruh karyawan guna mendapatkan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan kewat kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, serta aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan definisi definisi di atas sistem pengendalian internal pemerintah dapat disintesakan sebagai tindakan yang dilakukan terus menerus terdiri dari kebijakan dan prosedur untuk dilaksanakan oleh aparatur suatu pemerintahan guna meyakinkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya penerapan pengendalian internal dalam setiap kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan tidak terjadi tindakan-tindakan

penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya penggelapan (*fraud*), Arens *et al.* (2014); COSO (2013); Elder, *et.al* (2012); Messier *et al.* (2010); Mulyani (2009); PP Nomor 60 tahun 2008; dan Boynton & Johnson (2006).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dalam Mahmudi (2013) disebutkan elemen sistem pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian yaitu (a) penegakan integritas dan nilai etika, (b) komitmen terhadap kompetensi, (c) kepemimpinan yang kondusif, (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia, (g) perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif, dan (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko seperti (a) identifikasi risiko, dan (b) analisis risiko
3. Kegiatan Pengendalian seperti (a) revidu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, (b) pembinaan sumberdaya manusia, (c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, (d) pengendalian fisik atas aset, (e) penetapan dan revidu atas indikator dan ukuran kinerja, (f) pemisahan fungsi, (g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, (h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, (i) pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya, (j) akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatannya, dan (k) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi seperti (a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan (b) mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

2.3 Akuntabilitas Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas keuangan yang kredibel memuat informasi yang akurat/handal dan valid yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai perwujudan pertanggung jawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah yang bersangkutan. Untuk menghasilkan akuntabilitas instansi yang kredibel perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang kompeten, unsur pengawasan dan pelaksanaan audit yang profesional. Hal ini diperlukan agar akuntabilitas instansi berisi

informasi yang tidak mengandung kesalahan yang material dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Lenny Novianti, 2015). Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Sektor Publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan (Lenny Novianti, 2015).

Selanjutnya definisi kualitas pelaporan keuangan menurut Kieso *et al.* (2012: 4) Kualitas pelaporan keuangan merupakan akurasi laporan keuangan dalam menyampaikan informasi tentang operasi perusahaan, khususnya terhadap arus kas yang diharapkan, agar investor dapat mengambil keputusan investasi. Sementara Jonas and Blanchet (2000:367) memberikan definisi kualitas pelaporan keuangan sebagai berikut: “*Quality financial reporting is full and transparent financial information that is not designed to obfuscate or mislead users*”. Definisi tersebut menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan adalah informasi keuangan penuh dan transparan yang tidak dirancang untuk mengaburkan atau menyesatkan pengguna. Menurut *Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities* yang dikeluarkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (2010), menetapkan dimensi dari kualitas pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. *Relevance*

Financial and non-financial information is relevant if it is capable of making a difference in achieving the objectives of financial reporting. Financial and non-financial information is capable of making a difference when it has confirmatory value, predictive value, or both. It may be capable of making a difference, and thus be relevant, even if some users choose not to take advantage of it or are already aware of it.

2. *Faithful representation*

To be useful in financial reporting, information must be a faithful representation of the economic and other phenomena that it purports to represent. Faithful representation is attained when the depiction of the phenomenon is complete, neutral, and free from material error. Information that faithfully represents an economic or other phenomenon depicts the substance of the underlying transaction, other event, activity or circumstance which is not necessarily always the same as its legal form.

3. *Understandability*

Understandability is the quality of information

that enables users to comprehend its meaning. GPFs of public sector entities should present information in a manner that responds to the needs and knowledge base of users, and to the nature of the information presented. For example, explanations of financial and non-financial information and narrative reporting of achievements and expectations should be written in plain language, and presented in a manner that is readily understandable by users. Understandability is enhanced when information is classified, characterized, and presented clearly and concisely. Comparability also can enhance understandability.

4. *Timeliness*

Timeliness means having information available for users before it loses its capacity to be useful for accountability and decision-making purposes. Having relevant information available sooner can enhance its usefulness as input to assessments of accountability and its capacity to inform and influence decisions that need to be made. A lack of timeliness can render information less useful.

5. *Comparability*

Comparability is the quality of information that enables users to identify similarities in, and differences between, two sets of phenomena. Comparability is not a quality of an individual item of information, but rather a quality of the relationship between two or more items of information.

6. *Verifiability*

Verifiability is the quality of information that helps assure users that information in GPFs faithfully represents the phenomena that it purports to represent.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka komponen kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam konteks penelitian ini mengacu pada karakteristik kualitatif IPSASB (2010); Jonas dan Blanchet (2000); SAP (2010); FASB (2010); Beasly dan Bram (2009); yaitu *relevance*, *reliability*, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:13). Sesuai dengan sifatnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh antar variabel, yaitu pengaruh variabel bebas (*independent*) yakni *good government governance* (X1) dan *Pengendalian intern* (X2) serta

variable terikat (dependen) adalah akuntabilitas laporan keuangan setor publik (Y). Lokasi penelitian / unit analisis pada penelitian ini terdiri dari 8 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Unit observasinya yaitu inspektorat pemerintah daerah dan dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah serta SKPD lainnya pada 8 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Pengambilan data telah dilaksanakan tahun 2019. Teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan ini dilakukan dengan observasi dan wawancara serta memberikan daftar pertanyaan kepada responden, dengan tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 117 responden. Analisis data menggunakan regresi berganda, pengujian prasyarat analisis dilakukan sebelum pengujian hipotesis yang meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolineritas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner dan wawancara. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan yaitu bulan April sampai dengan Agustus 2019. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi langsung unit analisis yaitu SKPD pemerintah daerah di Sulawesi Utara. Dari 239 kuesioner yang disebar, tingkat pengembalian sebesar 49% atau sebanyak 117 yang dikembalikan dan dapat diolah datanya. Data data responden dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Data Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	55	47%
Perempuan	62	53%
Pendidikan		
Diploma	5	4.3%
S1	71	60.7%
S2	39	33.4%
S3	2	1.6%
Umur		
26-35	35	29.9%
36-45	51	43.6%
46-55	28	23.9%
>55	3	2.6%

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal, sehingga uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Uji statistik sederhana yang sering digunakan untuk menguji asumsi normalitas adalah dengan menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov-Smirnov. Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari alpha 5%, maka menunjukkan distribusi data normal. Hasil uji

normalitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.99367849
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.057
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 ^c
a. Test distribution is Normal.		

Koefisien kolerasi pada intinya untuk mencari tahu seberapa besar hubungan yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan cara melihat nilai R dari hasil output program spss 22. Dari output spss diatas dapat dilihat nilai R sebesar 0,663 atau 66,3% dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.663 ^a	.439	.434	6.02418
a. Predictors: (Constant), x				

Tabel 5. Coefficients

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Std. Error	
Model	B		Beta	t	Sig.
1 (Constant)	19.189			4.583	.000
X	.971	.111	.663	8.766	.000
a. Dependent Variable: y					

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh good government governance dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GGG dengan koefisien regresi sebesar 0, 971, nilai t_{hitung} (8,766 > t_{tabel} (1,661) dan taraf signifikan 0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa GGG dan pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan sector public.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Good government governance berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan sektor publik.
2. Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPK Republik Indonesia, Indeks hasil Pemeriksaan Sementara Semester II Tahun 2019
- [2] COSO (The Committee of Sponsoring Organizations

- of the Treadway Commission. *Internal Control*. 2013. *Integrated Framework. Guidance on Monitoring Internal Control Systems*, Introduction.
- [3] International Public Sector Accounting Standards Board. 2010. *Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities*. The International Federation of Accountants (IFAC). www.ifac.org
- [4] <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Region-Information/id/17-Asia%E2%80%94South-eastern-Asia>
- [5] <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/20/123447426/sri-mulyani-banyak-laporan-keuangan-daerah-wtp-tapi-kepala-daerahnya-korupsi>
- [6] Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- [7] IFAC and CIPFA. 2014. *International Framework Good Governance in The Public Sector*. IFAC and CIPFA
- [8] Jonas, G.J., and Blanchet, J. 2000. Assessing Quality of Financial Reporting. *Accounting Horizons*, no.3, vol.14. page 353-363
- [9] Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., Warfield, Terry D. 2012. *Intermediate Accounting*. John Wiley & Sons. Inc.
- [10] Messier, William F, Steven M. Glover, and Douglas F. Prawitt. 2010. *Auditing & Assurance Services A System Approach*, International Edition McGraw-Hill/Irwin Companies Inc. New York.
- [11] Public Sector Governance pada pemerintah daerah, Lenny Novianti, 2015
- [12] Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- [13] Sedarmayanti. 2013. *Good Governance, "Kepemerintahan Yang Baik"*. Bagian kedua. Edisi revisi. Penerbit Mandar Maju
- [14] Sugiyono, 2017. *Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung.
- [15] Elder, Randal J., Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens. 2012. *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach*. Fourteenth Edition. Pearson Prentice Hall. London.
- [16] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.